



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 351/SEK/OT.01.1/2/2020 20 Februari 2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 bendel
Hal : Undangan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut
Temuan BPK

Yth. Ketua Pengadilan sebagaimana daftar terlampir
di -
Tempat

Menindaklanjuti rapat koordinasi antara Sekretaris Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 18 Februari 2020 terkait dengan temuan BPK atas pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pengadilan dengan Bank Tabungan Negara, bersama ini Mahkamah Agung akan mengadakan rapat tindak lanjut temuan BPK tersebut yang diikuti oleh Ketua, Panitera, dan Sekretaris Pengadilan, pada:

Hari : Rabu-Kamis
Tanggal : 26-27 Februari 2020
Tempat : Hotel RedTop Pecenongan,
Jl. Pecenongan No.2 No.72, RT.2/RW.4, Kb. Klp,
Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat
Check-in : Rabu, 26 Februari 2020 pukul 16.00 -18.00 WIB

Mengingat pentingnya acara, diminta agar Saudara hadir bersama Panitera dan Sekretaris **tepat waktu dan tidak boleh mewakilkan** serta memperhatikan catatan sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih



Sekretaris Mahkamah Agung

A. S. Pudjoharsoyo

Catatan:

1. Pakaian batik lengan panjang;
2. Membawa dokumen PKS dan PPO antara Pengadilan dengan BTN;
3. Membawa dokumen Berita Acara Serah Terima barang/uang/jasa BTN;
4. Tiket pesawat, akomodasi, dan transportasi bagi yang tidak mendapatkan undangan untuk menghadiri acara Laporan Tahunan MA tahun 2019 dibebankan pada DIPA BUA;
5. Peserta yang mendapatkan undangan untuk menghadiri acara Laporan Tahunan MA tahun 2019, tiket pesawat, transport lokal dibebankan pada DIPA masing-masing pengadilan;
6. Peserta yang mendapatkan undangan untuk menghadiri acara Laporan Tahunan MA tahun 2019, tiket kepulangan agar menyesuaikan setelah acara rapat koordinasi dengan BPK ini selesai.
7. Peserta tersebut pada poin 4, agar mengirimkan tiket pesawat PP (**dari satker asal/tempat tugas ke Jakarta**) melalui email renprog@ymail.com paling lambat hari Minggu tanggal 23 Februari 2020, bagi peserta yang melakukan perjalanan tidak sesuai dengan ketentuan ini tidak bisa dilakukan penggantian tiket pesawat;
8. Konfirmasi kehadiran agar dikirimkan ke email renprog@ymail.com paling lambat hari Minggu tanggal 23 Februari 2020;
9. Contact person: - Grace Maria, Hp. 081382922565;
- Yudi Yudiana, Hp. 08118809951.

Lampiran Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor : 351/SEK/OT.01.1/2/2020
Tanggal : 20 Februari 2020

FORMULIR KONFIRMASI KEHADIRAN
KETUA/PANITERA/ SEKRETARIS (*coret yang tidak perlu)

Nama Lengkap :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Nomor HP :
Tipe Kamar : Smoking/Non Smoking (*coret yang tidak perlu)

dengan ini menyatakan hadir pada acara rapat tindak lanjut temuan BPK pada tanggal 26 s.d 27 Februari 2020. Formulir ini sekaligus sebagai bentuk persetujuan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi peserta yang tidak mendapatkan undangan untuk menghadiri acara Laporan Tahunan 2019, biaya tiket pesawat dari pengadilan asal ke Jakarta PP dan biaya transportasi dari Bandara Jakarta ke tempat acara dibebankan pada DIPA Badan Urusan Administrasi.
2. Bagi peserta yang mendapatkan undangan untuk menghadiri acara Laporan Tahunan 2019, biaya tiket pesawat dari pengadilan asal ke Jakarta PP dan biaya transportasi dari Bandara Jakarta ke tempat acara dibebankan pada DIPA masing-masing pengadilan.
3. Biaya penginapan di Jakarta tanggal 26 s.d 27 Februari 2020 dibebankan pada DIPA Badan Urusan Administrasi.

Demikian formulir ini disampaikan untuk dipergunakan seperlunya.

....., Februari 2020

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

Lampiran Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI

Nomor : 351/SEK/OT.01.1/2/2020

Tanggal : 20 Februari 2020

DAFTAR KETUA PENGADILAN YANG DI UNDANG

NO.	SATUAN KERJA
1	PENGADILAN NEGERI MEDAN
2	PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI
3	PENGADILAN NEGERI KISARAN
4	PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM
5	PENGADILAN NEGERI BALIGE
6	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
7	PENGADILAN NEGERI PADANG
8	PENGADILAN NEGERI MANADO
9	PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI
10	PENGADILAN NEGERI PALU
11	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
12	PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA
13	PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE
14	PENGADILAN NEGERI MAROS
15	PENGADILAN NEGERI PARE-PARE
16	PENGADILAN NEGERI PALOPO
17	PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
18	PENGADILAN NEGERI DUMAI
19	PENGADILAN NEGERI JAYAPURA
20	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG
21	PENGADILAN NEGERI BATAM
22	PENGADILAN NEGERI MATARAM
23	PENGADILAN NEGERI AMBON
24	PENGADILAN NEGERI TERNATE
25	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG
26	PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN
27	PENGADILAN NEGERI SUKADANA
28	PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
29	PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
30	PENGADILAN NEGERI BONTANG
31	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA
32	PENGADILAN NEGERI SAMPIT
33	PENGADILAN NEGERI TARAKAN
34	PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN
35	PENGADILAN NEGERI MARABAHAN
36	PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
37	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
38	PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG
39	PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH
40	PENGADILAN NEGERI SANGGAU
41	PENGADILAN NEGERI SEMARANG
42	PENGADILAN NEGERI TEGAL
43	PENGADILAN NEGERI KUDUS
44	PENGADILAN NEGERI PATI
45	PENGADILAN NEGERI PEMALANG
46	PENGADILAN NEGERI KENDAL
47	PENGADILAN NEGERI DEMAK
48	PENGADILAN NEGERI SALATIGA
49	PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG DI UNGARAN
50	PENGADILAN NEGERI JEPARA
51	PENGADILAN NEGERI BATANG

52	PENGADILAN NEGERI KEBUMEN
53	PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG
54	PENGADILAN NEGERI SURAKARTA
55	PENGADILAN NEGERI SRAGEN
56	PENGADILAN NEGERI WONOGIRI
57	PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO
58	PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR
59	PENGADILAN NEGERI BOYOLALI
60	PENGADILAN NEGERI KLATEN
61	PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO
62	PENGADILAN NEGERI CILACAP
63	PENGADILAN NEGERI BANYUMAS
64	PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
65	PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA
66	PENGADILAN NEGERI KABUPATEN TEGAL DI SLAWI
67	PENGADILAN AGAMA SLAWI
68	PENGADILAN NEGERI SUMEDANG
69	PENGADILAN NEGERI GARUT
70	PENGADILAN NEGERI CIAMIS
71	PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA
72	PENGADILAN NEGERI BEKASI
73	PENGADILAN NEGERI KARAWANG
74	PENGADILAN NEGERI SUBANG
75	PENGADILAN NEGERI BOGOR
76	PENGADILAN NEGERI CIANJUR
77	PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA
78	PENGADILAN NEGERI SUMBER
79	PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG
80	PENGADILAN NEGERI BANJAR
81	PENGADILAN NEGERI CIKARANG
82	PENGADILAN NEGERI DEPOK
83	PENGADILAN NEGERI KAB.BOGOR DI CIBINONG, JAWA
84	PENGADILAN NEGERI SURABAYA
85	PENGADILAN NEGERI TUBAN
86	PENGADILAN NEGERI GRESIK
87	PENGADILAN NEGERI SIDOARJO
88	PENGADILAN NEGERI JOMBANG
89	PENGADILAN NEGERI JEMBER
90	PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI
91	PENGADILAN NEGERI NGANJUK
92	PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK
93	PENGADILAN NEGERI MALANG
94	PENGADILAN NEGERI PASURUAN
95	PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO
96	PENGADILAN NEGERI LUMAJANG
97	PENGADILAN NEGERI BANGIL
98	PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN
99	PENGADILAN NEGERI MADIUN
100	PENGADILAN NEGERI PONOROGO
101	PENGADILAN NEGERI KAB. KEDIRI
102	PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO
103	PENGADILAN AGAMA JOMBANG
104	PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN
105	PENGADILAN AGAMA BANGKALAN
106	PENGADILAN AGAMA SAMPANG
107	PENGADILAN NEGERI KAB.MALANG, JAWA TIMUR
108	PENGADILAN NEGERI JAMBI
109	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
110	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
111	PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
112	PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR

113	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
114	PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA
115	PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR
116	PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
117	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
118	PENGADILAN NEGERI WATES
119	PENGADILAN NEGERI WONOSARI
120	PENGADILAN NEGERI SLEMAN
121	PENGADILAN NEGERI BANTUL
122	PENGADILAN TINGGI BENGKULU
123	PENGADILAN NEGERI SERANG
124	PENGADILAN NEGERI TANGERANG
125	PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA
126	PENGADILAN NEGERI DENPASAR
127	PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
128	PENGADILAN NEGERI KARANGASEM
129	PENGADILAN NEGERI GIANYAR
130	PENGADILAN NEGERI KOBA